



## LAPORAN UTAMA

# PERHUTANAN SOSIAL DAN HAMBATANNYA DI TULUNGAGUNG

Oleh: Muhammad Ichwan (Direktur PPLH Mangkubumi)

### KETAHANAN PANGAN KOK TEBU ?

Penerbitan SK Izin Perhutanan Sosial IPHPS masyarakat Desa Tenggarejo Tulungagung terhambat oleh program penanaman tebu PTPN X dan Perhutani.

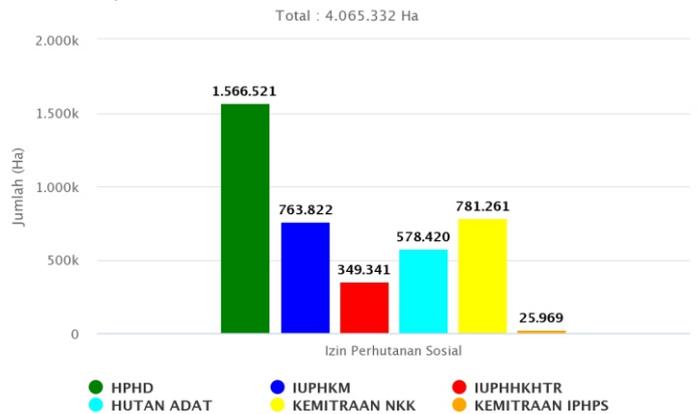
Kerjasama investasi tebu tersebut berada di lokasi yang sama dengan yang diajukan oleh masyarakat Tenggarejo. Upaya yang telah dilakukan yaitu mengirim surat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) (Feb 2019) dan ke ADM Perhutani Blitar (Nov 2019), meminta mereka untuk merevisi alokasi lahan penanaman tebu, agar tidak berada pada lahan yang sudah diusulkan dan sudah di verifikasi teknis untuk IPHPS. Sampai saat ini, dua surat itu belum ada jawaban, dan petani masih menguasai dan mengelola lahan tersebut sampai sekarang.

Pada Tanggal 3 Oktober 2017, Perhutani KPH Blitar dan PTPN X melakukan sosialisasi program penanaman tebu di hutan Tenggarejo. Pada saat itu, masyarakat sudah menyatakan menolak dengan alasan: tidak ada sosialisasi sebelum surat kerjasama terbit, tidak ada kesepakatan warga untuk menerima proyek penanaman tebu, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan tinggi sekali. Tanggal 15 Mei 2018, masyarakat Tenggarejo mengajukan IPHPS seluas 705.53 Ha melalui kelompok pengusul KTH Wonodadi Lestari dengan jumlah anggota pengusul 712 Kepala Keluarga. Tanggal 26 November 2018, muncul informasi dari Ditjen Planologi tentang Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) IPHPS di Desa Tenggarejo seluas 568 ha. Tanggal 31 Januari dan 1 Februari 2019, telah dilakukan verifikasi teknis (subyek dan tutupan lahan) di Desa Tenggarejo oleh Kementerian LHK. Hasilnya menyatakan bahwa terdapat 440 ha dari 568 ha merupakan areal kerjasama penanaman tebu antara Perhutani dan PTPN X. Untuk penerbitan SK IPHPS, Kementerian LHK akan melakukan pembahasan lanjutan. Tanggal 7 Februari 2019, telah diselenggarakan Musyawarah Desa Tenggarejo untuk membahas rencana penanaman tebu pada 440 hektar di lokasi hutan yang diajukan IPHPS. Musyawarah Desa itu menyepakati penolakan atas proyek kerjasama PTPN X dan Perhutani tentang penanaman tebu di areal calon lokasi IPHPS Desa Tenggarejo.

Tanggal 11 Februari 2019, KTH Wonodadi Lestari mengirim surat ke Menteri LHK tentang Permohonan revisi alokasi lahan budidaya tanaman tebu di hutan pangkuan desa Tenggarejo. Surat tersebut dilampiri berita acara penolakan dengan dibubuhi tandatangan dari perwakilan seluruh warga Tenggarejo. Sampai dengan saat ini, surat itu belum mendapatkan balasan dari Menteri LHK. Tanggal 4 November 2019, KTH Wonodadi Lestari mengirim surat ke ADM Perhutani KPH Blitar, yang isi suratnya sama dengan surat ke Menteri LHK, yaitu tentang permohonan revisi alokasi lahan budidaya tanaman tebu di hutan pangkuan desa Tenggarejo. Tanggal 12 Desember 2019, Dua orang dari KTH Wonodadi mendatangi ADM Perhutani KPH Blitar dan diterima oleh Wakil ADM Pak Sarman, Kasi Kelola SDH Pak Andry, dan Kasi

Kelola SDH Pak Andry, dan Kasi Perencanaan Pak Yasman. Pada intinya, Perhutani KPH Blitar menyatakan tidak punya kewenangan untuk merevisi atau membatalkan kontrak kerjasama penanaman tebu dengan PTPN X. Dan kelompok disarankan untuk menyurati Menteri LHK dan audiensi di sana. Sampai saat ini, pihak PTPN X maupun Perhutani belum melakukan kegiatan di lahan. Lahan masih dikelola oleh petani dengan tanaman pertanian, buah-buahan, dan pohon.

Capaian Izin Perhutanan Sosial Tahun 2007 – 2020



Sumber: <http://pkps.menlhk.go.id/#statistik>

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di sekitar hutan melalui Perhutanan Sosial. Melalui Peraturan Menteri LHK 83/2016 dan 39/2017, Pemerintah memberikan izin akses kelola hutan bagi masyarakat yang dekat dengan hutan. Regulasi itu sebagai bagian dari solusi atas permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia yang antara lain yaitu kemiskinan masyarakat, ketahanan pangan, kelestarian hutan, dan konflik pengelolaan hutan. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial adalah izin yang diberikan oleh Menteri LHK kepada kelompok masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani dengan masa berlaku izin 35 tahun dan setiap 5 tahun dilakukan evaluasi. IPHPS diatur dalam Peraturan Menteri LHK 39/2017. Lahan yang bisa diberikan izin IPHPS adalah wilayah kerja Perum Perhutani yang memiliki tutupan lahan kurang atau sama dengan 10% secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih.

Pola tanam lahan IPHPS yang diatur dalam Permen LHK 39/2017 yaitu (a).Hutan Produksi: tanaman kayu 50%, tanaman MPTS 30%, dan tanaman semusim 20%; (b).Hutan Lindung: tanaman kayu 20%, tanaman MPTS 80%. Sementara itu, bagi hasil untuk (a).Perhutani antara lain tanaman kayu 30%, tanaman MPTS 20%, tanaman semusim 10%; (b).Petani antara lain tanaman

kayu 30%, tanaman MPTS 20%, tanaman semusim 10%; (b).Petani antara lain tanaman kayu 70%, tanaman MPTS 80%, dan tanaman semusim 90%.

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Perhutani dengan PTPN X adalah Peraturan Menteri LHK P.81 2016 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja Perhutani seluas 2,4 juta ha tidak luput menjadi obyek perhatian pemerintah terkait ketahanan pangan, sekaligus kelestarian hutan. Sejak tahun-tahun reformasi 1998-1999 hingga sekarang banyak lahan hutan yang tidak ada pohon satupun yang hidup. Masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk jagung, ketela, tanaman buah, dll. Namun, cara pikir Perhutani sepertinya berbeda, mereka lebih mau mengambil kerjasama dengan investor untuk melakukan penanaman salah satunya penanaman tebu dengan dalih ketahanan pangan. Kasus proyek penanaman tebu di Tenggarejo tidak legitimate, sehingga perlu ditinjau ulang. Mengapa? Karena dalam Pasal 6 ayat 2 Permen LHK 81/2018: "Dalam hal mitra kerjasama BUMN, BUMD wajib melibatkan masyarakat setempat sebagai mitra kerjasama." Sosialisasi sudah ditolak oleh masyarakat, secara teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan juga tidak dijalankan.

Anomali ketahanan pangan terjadi. Pada satu sisi, mengejar statistik produksi tanaman pangan tetapi dengan menggunakan mekanisme modal besar dari para investor baik swasta maupun negara, pada sisi lain menyingkirkan masyarakat yang akan memproduksi tanaman pangan yang bisa menunjang statistik dan juga menyelesaikan ketahanan pangan secara riil. Masyarakat Tenggarejo kecewa dengan hal ini. Keinginan untuk mendapatkan akses kelola hutan yang lebih baik melalui IPHPS pun kini butuh perjuangan lagi. Dengan Tebunisasi ini, masyarakat Tenggarejo hanya dijadikan obyek dari sebuah kebijakan (tidak pernah diajak musyawarah atau merencanakan). Pengelolaan hutan di Jawa harus menuju pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Rakyat first ! Menteri LHK harus membuat prioritas dalam dua klaim pada lahan yang sama ini antara IPHPS dan Tebu. Dan melihat statistik implementasi Perhutanan Sosial yang lambat, seharusnya Menteri LHK memprioritaskan Perhutanan Sosial jika ingin menyorot 2 kepentingan luhur: lingkungan dan kesejahteraan.

**PROYEK REHABILITASI YANG DIPAKSAKAN**

"Pasirnya putih, belum banyak wisatawan yang berkunjung di situ. Jadi masih bersih dan orisinal". Begitu salah satu komentar dari salah satu wisatawan asal Kediri ketika berkunjung ke Pantai sanggar desa Jengglunharjo Tulungagung. Pantai sanggar adalah salah satu pantai terindah di Tulungagung yang menawarkan orisinalitas wisata pantai dengan pasir putih dan panorama teluk yang sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda.

Pesona pantai Sanggar sungguh luar biasa. Untuk menuju ke sana, perjalanan dari kota Tulungagung kurang lebih 1 jam ke arah selatan hingga sampai kecamatan Tanggunggunung. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan menuju pusat desa Jengglunharjo. Jalan cukup layak dengan aspal cukup besar dapat dilalui mobil dari dua arah. Arah destinasi dilanjutkan menuju dusun Ngelo dengan jalan aspal yang sama. Ngelo adalah dusun terakhir pemukiman lalu menelusuri jalan setapak di tengah kawasan hutan dengan menggunakan motor. Sebenarnya bisa menggunakan mobil tetapi perlu mobil yang dikhususkan untuk



Pantai Sanggar Desa Jengglunharjo - Tulungagung

pemukiman lalu menelusuri jalan setapak di tengah kawasan hutan dengan menggunakan motor. Sebenarnya bisa menggunakan mobil tetapi perlu mobil yang dikhususkan untuk medan terjal dan hanya cukup untuk satu mobil. Di kanan kiri jalan setapak tersebut, kita akan melihat hamparan lahan produktif yang diusahakan masyarakat. Lahan tersebut berstatus kawasan hutan, tetapi sejak krisis politik dan ekonomi tahun 1998-2004, landscape hutan berubah, dari tanaman hutan monokultur (jenis tanaman sama) berubah menjadi tanaman agroforestry yang dikreasikan oleh masyarakat. Di kanan kiri jalan setapak tersebut kita akan menyaksikan tanaman sengon, alpukat, manggga. Kita juga mendapati hamparan kebun pisang yang dicampur dengan jenis tanaman lain. Semak-semak belukar bekas hutan yang tidak terurus disulap oleh masyarakat menjadi lahan yang sangat produktif.

Masyarakat Jengglunharjo telah lama mengelola hutan di desanya. Salah satu warga dusun Sumber desa Jengglunharjo mengatakan bahkan hidupnya orang Sumber adalah dari tanah hutan. Karena permasalahan klasik di desa-desa hutan, bahwa mereka tidak punya lahan pertanian milik. Penataan tanah negara termasuk juga hutan negara telah menciptakan keterbatasan ruang kelola masyarakat atas sumber daya agraria yang dilakukan empat generasi dari sekarang. Kemudian, masyarakat menggarap di tanah hutan semakin intensif setelah terjadi penjarahan hutan besar-besaran terutama pada tahun 1999-2000. Lahan yang sudah lalu ditanami masyarakat dengan macam-macam tanaman. Komoditas utamanya yaitu pisang. Di dusun Ngelo, rumah-rumah mulai dirubah dari rumah gedek perlahan ke rumah permanen. Mereka mengatakan, selain karena dari hasil remitansi kerja di luar negeri sebagai pekerja domestik, terutama kaum perempuan, hasil panen pisang dari tegal mereka juga memberikan kontribusi pada perbaikan rumah.

Ketika Program Perhutanan Sosial dikeluarkan oleh Pemerintah, masyarakat Jengglunharjo yang tergabung dalam KTH Sanggar Bersatu mengajukan skema Hutan Desa karena mereka mendapat informasi bahwa hutan di desanya adalah Hutan Lindung. Kementerian LHK menyarankan untuk merubah usulan menjadi skema IPHPS karena di sana hutan produksi. Kemudian pada awal tahun ini, KTH mengusulkan IPHPS 805,5 hektar untuk 450 KK. Tetapi KTH tidak tahu mengapa sampai sekarang tidak kunjung mendapat kabar dari Kementerian LHK tentang mekanisme lanjutan setelah usulan tersebut diverifikasi administratif. KTH menunggu di Jengglunharjo atas kedatangan



Plang RHL di Kawasan Hutan Jengglngharjo

tim Kementerian LHK untuk memverifikasi lapangan (subyek dan obyek) atas usulan IPHPS tersebut. Ketika masyarakat menunggu verifikasi dari Kementerian LHK atas usulan IPHPS, tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi, lahan yang selama ini mereka garap di beri patok-patok penanda untuk dilubangi untuk kemudian akan ditanami pohon oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Brantas. Apa yang mereka sebut sebagai proyek rehabilitasi ini menafsirkan bahwa lahan yang digarap oleh masyarakat adalah berstatus hutan lindung dan kritis. Atas tafsiran sepihak tersebut, masyarakat menolak. Karena menurut masyarakat, lahan tersebut telah dinyatakan oleh Kementerian LHK sebagai hutan produksi dan menurut masyarakat, lahan tersebut sama sekali tidak kritis karena tanaman campuran (pohon, buah, semusim) ditanam sudah lama oleh masyarakat hingga kini.

KTH Sanggar Bersatu melihat ada indikasi pemaksaan kehendak tanpa pihak BP DAS dan Perhutani mengajak bicara para pengelola lahan yang ada saat ini. Patok-patok sebagai tanda, dan lubang-lubang calon ditanami pohon itu di lapangan telah mengganggu dan bahkan merusak tanaman-tanaman yang sudah ada di lahan yang ditanam masyarakat. Oleh karena itu, KTH meminta kepada pemerintah untuk mengalihkan lokasi proyek rehabilitasi itu ke tempat lain yang lebih kritis kondisinya. "Mengapa kok lokasi proyek ini ada pada lahan yang kami kelola dan kami sedang ajukan izin perhutanan sosialnya? Ada apa ini? Mengapa kami rakyat kecil tidak pernah diajak bicara?" Pertanyaan yang selalu tergiang-ingang di benak anggota KTH.

### SETELAH DAPAT IZIN IPHPS LALU APA?

Akhir tahun 2018, masyarakat Desa Besole merasa sangat bahagia karena mendapatkan izin dari Menteri LHK untuk mengelola hutan seluas 845 hektar di desanya.

Hutan adalah sumber penghidupan bagi manusia. Perhutanan sosial atau sering disingkat PS merupakan program pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, menyelesaikan konflik, dan memulihkan kondisi hutan. Data dari kementerian LHK menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2019, dari 120 juta kawasan hutan negara di Indonesia, baru 3,3 juta atau 3% yang kawasan hutan negara di Indonesia, baru 3,3 juta atau 3% yang diberikan izin perhutanan sosial kepada masyarakat. Selebihnya masih dikelola oleh pemerintah, BUMN, dan swasta. Sedangkan untuk hutan yang dikelola perhutani, dari 2,4 juta ha, baru 381 ribu ha atau 16% yang dikelola masyarakat melalui izin perhutanan sosial (355 ribu kulin kk, 26 ribu iphps).

Secara administratif, Desa Besole merupakan bagian dari kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Desa ini terbagi dalam tiga dusun yaitu besole, gambiran, dan popoh. Memiliki luas wilayah hampir 600 hektar dengan jumlah penduduk 11.582 jiwa. Kondisi lahan di desa ini didominasi oleh landscape bebatuan. Sejak jaman penjajahan Belanda abad XIX di desa ini sudah terdapat kegiatan penambangan batu marmer dan onix. Pada tahun 1960an, industri pengolahan batu marmer dan onix mulai berkembang dan menjadi sumber mata pencaharian penduduk hingga kini.

Selain pengolahan batu, masyarakat desa Besole juga mengandalkan hidupnya dari tanah hutan. Karena keterbatasan lahan pertanian milik masyarakat, lahan hutan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian campur. Krisis politik dan ekonomi tahun 1998-2004 yang berakibat deforestasi karena aksi massa menjadikan lahan hutan tak terkelola dan kemudian masyarakat memanfaatkannya. Masyarakat menanam tanaman pohon, tanaman buah, dan juga tanaman pangan semusim.

Setelah kurang lebih sepuluh tahun masyarakat melalui Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) bekerjasama dengan Perum Perhutani dengan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), maka pada tahun 2017, masyarakat dan Pemdes Besole mendapatkan sosialisasi tentang program perhutanan sosial IPHPS dari PPLH Mangkubumi. Kemudian awal tahun 2018 masyarakat mengajukan izin perhutanan sosial untuk hutan yang ada di desanya kepada Menteri LHK. Akhir tahun 2018, kelompok tani hutan (KTH) argo makmur lestari akhirnya mendapatkan izin IPHPS. Izin tersebut berjangka waktu 35 tahun. Dengan adanya SK dari Menteri LHK Nomor 8490 tahun 2018, KTH argo makmur lestari yang dipimpin oleh Mukalan, akan berusaha memulihkan hutan Besole kembali. KTH memiliki anggota 714 KK mengerjakan lahan hutan seluas 845 di RPH Besole BKP Campurdarat KPH Blitar.

Tantangan yang dihadapi oleh KTH adalah pantai wisata coro yang pada izin IPHPS masuk dalam wilayah kelola KTH, tetapi saat ini dikelola oleh investor swasta melalui kerjasama dengan Perhutani. KTH masih perlu melakukan negosiasi dan upaya-upaya lain yang dipandang perlu untuk menyelesaikan sengketa klaim yang terjadi di obyek wisata ini. Saat ini KTH juga tengah menata diri termasuk menyusun rencana pengelolaan hutan dan melakukan pemetaan areal izin IPHPS.



Bentangan Lahan Besole

OPINI

# HUTAN TIDAK LAGI MASKULIN: PERAN PEREMPUAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Oleh: Munif Rodaim (Peneliti PPLH Mangkubumi)

Penguasaan dan penggunaan hutan di pesisir selatan Tulungagung Jawa Timur berubah drastis dalam 20 tahun terakhir. Salah satu yang terlihat signifikan mempengaruhi perubahan itu adalah peran perempuan migran yang menginvestasikan remitansinya ke hutan. Perum perhutani sebagai pengelola 2,4 juta hektar hutan di Jawa sejak 1961 mewarisi apa yang telah dikerjakan *boschwezen* (dinas kehutanan kolonial Belanda) dalam mengontrol tanah, spesies, dan tenaga kerja. Kontrol tersebut berubah sepanjang zaman. Di daerah selatan tulungagung, hutan jati hilang dan berubah menjadi tanaman sengon, jagung, pisang, dan tanaman buah lainnya. Masyarakat mulai menguasai lahan hutan, mengontrol penggunaan tanah hutan. Perum Perhutani, satu dua kali mewujudkan sisa-sisa kontrolnya dengan tindakan represif.

Pemerintah Indonesia mencoba mengakomodir fenomena itu dengan program social forestry bernama IPHPS yang pada intinya memberikan izin pemanfaatan hutan kepada masyarakat yang mengelola hutan dengan tegakan pohon di bawah 10%. Dalam mengurus tanah hutan, masyarakat mendapatkan modal dari remitansi anak perempuan maupun istri yang bekerja di luar daerah ataupun luar negeri. Maskulinitas penguasaan dan penggunaan hutan dengan kerja tebang kayu, belah kayu, angkut kayu, cangkul, dan tanam modal dari kerja laki-laki di luar daerah, kini lambat laun berganti dengan perubahan tanaman, sistem tenaga kerja, pengambilan keputusan, dan sumber modal. Perempuan menempati posisi baru dalam pengelolaan hutan dan merubah aspek-aspek ikutannya (acces, control, landuse, landcover, labor, etc).

Pesisir selatan Tulungagung adalah bagian dari kars selatan pulau jawa, dengan spesifikasi batu marmer. Perum Perhutani menentukan kelas hutan yang cocok pada tanah tandus dan berbatu adalah pohon jati. Sebelum penjarahan hutan tahun 2000, masyarakat hidup dari menanam palawija di sela-sela pohon jati dengan sistem tumpangsari kurang lebih 3 tahun sejak penanaman jati. Setelah itu, masyarakat harus pergi. Air susah, mata air tidak ada, sungai kering. Petani tak bertanah harus tunggu jadwal pembukaan hutan perhutani untuk dapatkan garapan yang 3 tahun tersebut. Situasi sulit tersebut membuat migrasi baik laki-laki maupun perempuan menjadi tinggi dari daerah ini. Tahun 1980an, program transmigrasi menyerap tenaga kerja dari daerah ini dengan membawa keluarga mereka. Tahun 1990an, ketika konsesi HPH, HTI, dan Perkebunan marak di luar Jawa, daerah ini juga menjadi salah satu sumber tenaga kerja. Tahun 2000an, banyak tenaga kerja perempuan migrasi ke luar negeri (hongkong, singapore, taiwan). Saat ini, sumber pekerjaan di dalam desa maupun di luar desa bercampur dalam ekonomi rumah tangga dan termanifestasikan dalam lahan hutan.

## BU SUKILAH

“Silahkan mampir ke rumah mas” ungkap beliau kepada saya setelah selesai pertemuan kelompok yang dadakan itu. Jujur saja, saya sangat kagum dengan semangat ibu muda ini (48 tahun) dalam mengikuti dinamika kelompok tani di Desa Jengglunharjo. Pada saat itu, kami dari PPLH Mangkubumi sedang coba

mendalami persoalan dan potensi di masyarakat dampingan dengan metode live in. Selama 1 minggu kami menginap dan mengikuti aktivitas harian masyarakat di tiga desa yang kami dampingi. Bu Sukilah sehari-hari mengurus rumah tangga dan mengurus *tegalan* di hutan bersama suaminya. Tegalan seluas 2 hektar ditanami oleh beliau dan suami dengan tanaman kayu-kayuan, pisang, alpukat, kunir, jagung, dan dadap bandung untuk ternak. Bu Sukilah sekarang ini pelihara 5 ekor sapi. Pakan sapi diperoleh dari tegalannya dan juga *luru* atau mencari rumput liar di hutan. Anaknya satu laki-laki masih sekolah kelas 3 SD dan selalu juara kelas. Saat ini, bu Sukilah dan suami sedang merintis berdagang hasil pertanian dari teman-temannya di dusun Ngelo Desa Jengglunharjo antara lain alpokat dan pisang.

Pada malam itu, ketua kelompok sangat bersemangat untuk mengumpulkan anggotanya. Saya dan teman-teman dari PPLH Mangkubumi diajak musyawarah dan dimintai update informasi tentang kebijakan Perhutanan Sosial. Mereka juga mendiskusikan tentang hambatan-hambatan yang terjadi ditengah-tengah upaya mereka mengajukan izin perhutanan sosial. Dalam pertemuan kelompok tersebut, salah satu peserta yang aktif di forum adalah Bu Sukilah. Menurut beliau, pengalaman migrasi kerja ke luar daerah membuatnya semakin berani tampil di depan urusan publik sepertihalnya dalam rapat-rapat kelompok tani. Bu Sukilah tidak sendiri, di belakangnya banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak terlalu terlihat tetapi memegang peranan utama dalam pengambilan keputusan serta kerja-kerja pertanian di *tegalan* hutan. Dari hasil kerja migrasi, bu Sukilah bisa membeli sapi dan kemudian dijual untuk membangun rumah sederhana di dusun Ngelo. Hasil migrasi juga dipergunakan untuk membeli dan membiayai pengolahan lahan tegalan di hutan.

Pengambilan keputusan atas lahan ditentukan oleh bu Sukilah setelah berembuk dengan suaminya. Pada saat musim penghujan, mereka menanam jagung. Dan untuk menjamin keberlangsungan pendapatan keluarga yang tidak bergantung pada musim kemarau maupun penghujan, mereka menanam tanaman buah seperti pisang, alpokat, dan juga empon-empon misalnya kunir. Tanaman pohon juga mereka tanam yaitu kayu



Bu Sukilah dalam Aktifitas Sehari-hari

jenis rimba. Beliau sebut, pola tanam itu sebagai pola tanam campur. Semua ada di lahan, tinggal menyesuaikan kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Di dusun Ngelo Desa Jengglunharjo, aktivitas di hutan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Bahkan anak-anak yang sudah cukup kuat untuk bantu di hutan, misalnya umur 13 tahun sudah membantu orang tuanya untuk kerja baik ngarit, tanam, memupuk, mengobat, merawat tanaman, maupun panen. Pagi berangkat, siang istirahat 2 jam, kembali lagi ke tegalan, sampai sore menjelang magrib. Kalau malam, pertemuan-pertemuan kelompok baik formal maupun informal selalu diadakan. Dalam pertemuan tersebut, membicarakan tentang peluang-peluang jenis tanaman yang memberikan hasil optimal secara ekonomi. Mereka juga bicarakan tentang konservasi hutan lindung yang ada di desa Jengglunharjo, agar mereka tidak selalu dicap sebagai perusak hutan. Mereka juga membicarakan tentang izin perhutanan sosial yang sudah setahun ini belum ada kabar dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

#### MENGIKUTI PELATIHAN PEMETAAN PARTISIPATIF

Pada bulan Desember 2019, bu Sukilah dan beberapa perempuan lain di tiga desa (Jengglunharjo, Tenggarejo, Besole) mengikuti pelatihan pemetaan partisipatif yang diselenggarakan oleh PPLH Mangkubumi dan DGM Indonesia. Pelatihan ini dilakukan guna membekali kemampuan serta pemahaman kelompok tentang tata cara melakukan batas area kerja yang wajib dilakukan bagi penerima izin IPHPS. Hal ini seperti diatur dalam P.39/KLHK/2017 bab III pasal 14 ayat 3 (b) yang mengatakan pemegang izin IPHPS wajib memberi tanda batas area kerjanya. Karena aturan dan tata cara pemetaan IPHPS ini merupakan '*sesuatu yang baru*' maka perlu untuk dipahami kepada masyarakat dan juga para pihak dalam domain IPHPS. Menghadirkan narasumber dari Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur, dan BPKH XI Yogyakarta, dan Ahli GIS. Peserta yang hadir tidak hanya dari kelompok tani, tetapi dari perangkat desa dan petugas lapangan Perhutani.

Peserta perempuan dan peserta yang lain mengikuti materi kelas dan materi lapangan di hutan. Mereka menerima teori tentang pemetaan dan juga praktek menggunakan GPS dan

pemasangan patok di hutan, menginput data GPS di komputer serta mengolahnya menjadi peta sederhana. Peserta perempuan selain Ibu Sukilah, ada 9 peserta perempuan lainnya yang penuh semangat, diantaranya ada Ibu Rita dari KTH Wonodadi Lestari Desa Tenggarejo yang aktif belajar mengoperasikan GPS dan naik-turun ketika praktek dilapangan. SK IPHPS KTH Agro Makmur Lestari Besole dalam lampiran peta-nya yang tidak dalam bentuk SHP tetapi berbentuk gps scanner, pada kegiatan praktek lapangan KTH dibantu oleh PPLH Mangkubumi menentukan titik koordinat batas arealnya yang banyak paragon. Berbekal dari materi pelatihan selama 2 hari ini, KTH Agro Makmur Lestari mengecek batas tersebut.

#### HUTAN TIDAK LAGI MASKULIN

Pengambilan keputusan, sumber input pengelolaan hutan, kerja-kerja pengelolaan hutan, serta komoditas dalam hutan di Tulungagung selatan berubah sejak 20 tahun terakhir ini. Banyak faktor yang membentuk perubahan-perubahan itu. Dahulu, sebelum jaman penjarahan hutan besar-besaran awal reformasi 1998-2000, segala segi tentang hutan didominasi oleh laki-laki. Tanaman hutan monokultur jati dan tumpangsari 3 tahun membuat hutan lebih 'ramah' pada tenaga kerja laki-laki. Sirkulasi modal untuk diinput dalam hutan juga berasal dari perputaran uang lokal. Tetapi setelah itu, situasi berubah. Migrasi kerja luar daerah dari para perempuan memungkinkan modal dari luar masuk ke hutan. Politik pengelolaan hutan berubah, ada kebijakan perhutanan sosial yang memungkinkan tanaman campur dan juga tidak terbatas menggarap lahan 3 tahun saja. Tanaman campur tersebut semakin membuka peluang bagi perempuan untuk masuk dalam ketenagakerjaan dalam hutan. Komoditas-komoditas selain kayu misalnya pisang, jagung, alpokat, kunir, dan lain-lain sangat ramah dengan tenaga kerja perempuan. Sangat kontras jika dibandingkan dengan tanaman monokultur jati yang pekerjaannya seputar logging dan pengangkutan. Dengan demikian, migrasi tenaga kerja, perubahan ekonomi keluarga, politik pengelolaan hutan mempengaruhi tenaga kerja dalam hutan. Lambat laun, maskulinitas yang selalu nempel pada hutan menjadi tidak lagi kentara.

### CERITA LAPANGAN

## PENERIMA IPHPS BESOLE : IBU PAINAH

Oleh: Herson Laeni (Koordinator Pendamping Lapangan PPLH Mangkubumi)

Raut muka **Bu Painah** sangat senang sekali ketika izin IPHPS diterima oleh KTH Agro Makmur Lestari Desa Besole Tulungagung. Beliau menganggap bahwa pemerintah telah mengakui bahwa kelompoknya punya hak untuk mengelola tegalan hutan di desa Besole. Bu Painah juga sekarang merasa aman mengelola tegalannya. Tidak lagi was-was, tidak lagi takut kalau-kalau nanti ada pihak lain yang coba untuk mengusir atau mengganggu beliau dalam bercocok tanam di tegalan.

Bu Painah saat ini berumur 68 tahun, beliau ingat orang tuanya pernah bercerita bahwa dirinya lahir pada saat kampungnya terkena "udan wedi" akibat gunung kelud meletus besar pada tahun 1951. Bahkan dari beberapa artikel, disebutkan bahwa hujan abu menyebar hingga Jawa Tengah dan bahkan hingga Bandung. Sudah 30 tahun, bu Painah ditinggal meninggal suaminya. Anaknya ada 3 yang semuanya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Hingga saat ini, bu Painah hidup sendiri di rumah dengan pekarangan yang numpang di tanah hutan. Sudah puluhan tahun beliau dan beberapa rumah hidup numpang di tanah hutan. Ada cerita tentang tukar menukar lahan yang belum selesai atau tertunda dan masyarakat disitu tidak punya akses dan kuasa untuk menentukannya.

Bu Painah garap lahan tegalan di hutan seluas 0,5 hektar. Pada tegalan tersebut, beliau tanam ketela, pisang, bayam, empon-empon. Pada awal Januari lalu, bu Painah sangat senang sekali, karena



Bu Painah

mendapatkan bantuan bibit Alpokat dari PPLH Mangkubumi yang didukung oleh DGM Indonesia. Bibit alpokat tersebut akan ditanam di tegalannya. Dalam ketentuan IPHPS, bu Painah mengerti bahwa harus ada tanaman kayu atau tanaman kehutanannya. Beliau sekarang sedang mencari bantuan bibit buah-buahan untuk kemudian akan ditanam di tegalannya yang tidak terlalu luas tersebut.

Mengelola lahan 0,5 hektar bagi bu Painah tidak terlalu berat. Beliau masih mampu untuk bekerja di tegalan dengan tanaman-tanaman campur tersebut. Kadang-kadang, untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat misalnya panen jagung dan pisang, beliau minta bantuan anak-anaknya. Bu Painah sangat menggantungkan lahan 0,5 hektar tersebut. Karena sehari-hari, untuk membeli beras, beliau mengandalkan panen pisang untuk

dijual dan dibelikan beras. Sedangkan untuk lauk, beliau biasanya beli ikan dan atau membuat lauk yang berasal dari ketela dari tegalannya. Untuk sayur-sayuran, cukup diambil dari tegalan misalnya bayam, daun singkong. Untuk bahan-bahan makanan yang tidak bisa diproduksi dari tegalan, beliau beli misalnya minyak goreng, bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, dan lain-lain. Dalam sehari tidak ada ½ kg beras beliau makan, dan belanja-belanja untuk makan maksimal 10 ribu. Itu dilakukan agar bu Painah masih bisa tetap makan setiap hari.

Bagi bu Painah, kegiatan Perhutanan Sosial ini sangat bermanfaat. Beliau tidak bisa bayangkan bagaimana jika tidak punya tegalan itu dan tidak ada perlindungan atas pengelolaan tegalan itu.

## CERITA LAPANGAN

### PEJUANG IPHPS JENGLUNG HARJO : PAK DJAURI

Oleh: Reyas Etika (Pendamping Lapangan PPLH Mangkubumi)

Sebagai petani hutan, Pak Djauri menghabiskan hampir seluruh energi dan waktu nya di hutan. Sehari-hari dia bekerja mencari rumput di hutan dan juga menanam pohon-pohon seperti alpokat, duren, sirsak dan mangga. Jika sudah berbuah, ia akan menjual hasil buahnya tersebut di pedagang pengepul dan terkadang juga dipasar. Saya pun sering mememuinya di hutan, dan tak jarang setelah selesai berbincang dengan beliau, saya pulang dikasih oleh-oleh hasil panen buahnya. "Disini dulu statusnya hutan lindung mas, dan sekarang berganti menjadi produksi," begitu dia mulai bercerita ketika saya temui. Bahkan setelah ceking lahan memang sangat sedikit sekali tanaman tegakan dari perhutani, mayoritas adalah swadaya masyarakat

Pak Djauri bercerita tentang liku-liku perjuangannya untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan secara adil. Dia bercerita bahwa ia pernah memperjuangkan hak petani sekitar Dam Kali Gede di Dusun Ngelo. Sebelumnya lahan sekitar Dam Kali Ngelo dibawah penguasaan Perhutani. Melalui perjuangan dia bersama masyarakat sekitar, kini lahan sekitar Dam Kali Ngelo pengelolaannya sudah menjadi hak warga sekitar. Banyaknya resistensi baik dari Perhutani maupun bahkan adanya ancaman kekerasan fisik dari oknum premanisme-pun sering dia dapatkan. Hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berjuang, khususnya dalam mendapatkan haknya atas pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan.

Saat ini, Pak Jauri sedang memperjuangkan agar masyarakat di Jengglung Harjo mendapatkan izin IPHPS. Kali inipun juga penuh dengan tantangan. "Ada pihak yang memang sengaja ingin menggagalkan KTH Sanggar Bersatu dalam pengusulan IPHPS ini" gerutunya ketika saat temui. Dia meneruskan ceritanya bahwa modus yang dilakukan dalam menggagalkan usaha ini misalnya adalah dengan mencatut nama-nama anggota LMDH Jengglung Harjo untuk diajukan kemitraan kulin KK oleh oknum Perhutani. Hal ini menjadai salah penghambat Pak Djauri dan KTH Sanggar Bersatu dalam pengusulan IPHPS. Ditanya perihal kenapa perhutani melakukan hal tersebut, ia pun menjawab, "mungkin jika perhutanan sosial ini sukses maka perhutani merasa dirugikan mas". Hal ini tentu mengisyaratkan bahwa ada sekelompok oknum yang memang ingin menggagalkan upaya KTH Sanggar Bersatu dalam pengajuan IPHPS di Jengglung Harjo ini.

Tak berhenti disitu saja, sosialisasi proyek RHL yang dilaksanakan oleh Perhutani pun tidak melibatkan anggota KTH Sanggar Bersatu. Hal ini jelas KTH Sanggar bersatu yang sudah mendapatkan akte notaries pada Tanggal 23 April 2019 ini dipandang sebelah mata. Padahal jelas mereka akan melakukan RHL disebagian lahan anggota KTH Sanggar Bersatu. Diapun menyemangati kelompoknya untuk menolak keras program RHL dilokasi mereka tersebut. Dalam waktu dekat ini dia bersama kelompoknya akan mengadakan hal ini kepada DPRD Kabupaten. "Ngene iki wis biasa mas..mas." begitu dia bergerutu dalam bahasa jawa sambil menghisap dalam-dalam rokok tengwe-nya untuk mengumpulkan seluruh energi perlawanannya.

Melalui PPLH Mangkubumi bersama dengan DGMI ini Pak Djauri sangat berharap bisa membantu persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh kelompok. Selama ini menurutnya PPLH Mangkubumi sudah sangat membantu baik dalam peningkatan pengetahuan kelompoknya melalui kegiatan pelatihan maupun pertemuan-pertemuan yang di fasilitasi oleh PPLH Mangkubumi. Di akhir wawancara dia berpesan: "mas, mumpung udane wis meduk ngene iki mbok kelompok dibantu bibit". Saya-pun berpamitan sambil berjanji untuk menyampaikan pesan tersebut kepada direktur PPLH Mangkubumi.



Pak Djauri

**INTERVIEW**

**BAPAK SUGIANTO: KETUA KTH WONODADI LESTARI**

Oleh: Muhaimin Alhadad (Pendamping Lapangan PPLH Mangkubumi)



Sugianto (62 th), Ketua Kelompok Tani Hutan Wonodadi Lestari desa Tenggarejo. Pak Ugik, panggilan akrab bapak 2 anak ini, perjuangannya untuk mendapatkan izin IPHPS masih terkendala kerjasama Perhutani dengan PTPN X. Disisi lain dia berharap melalui IPHPS ini kesejahteraan pesanggem di Tenggarejo meningkat dan hutan di pangkuan desa Tenggarejo menjadi lestari lagi. Berikut kutipan hasil wawancara kami di rumahnya.

**Q:** *Bisa diceritakan bagaimana awal mula bapak mengenal Perhutani Sosial khususnya IPHPS?*

**A:** Awalnya saya di kenalkan dengan Mas Ichwan Direktur PPLH Mangkubumi oleh mas Arif. Dari perkenalan tersebut saya banyak mendapatkan informasi tentang IPHPS dan saya-pun tertarik. Kemudian saya bersama Pak Lurah mengumpulkan dan menawarkan program IPHPS ini kepada warga di tiap-tiap dusun di Tenggarejo. Ada 4 dusun yaitu Tenggar, Ngayem, Mbakalan, dan Nglorok. Dan alhamdulillah warga semua setuju.

**Q:** *Kenapa bapak dan kelompok KTH Wonodadi Lestari tertarik mengusulkan IPHPS ini?*

**A:** Karena selama ini kita sebagai pesanggem hanya sebagai penggarap saja, soalnya tidak ada sharing sama sekali untuk tanaman tegakan (pohon-red) dari Perhutani kepada masyarakat. Sehingga selama ini pesanggem hanya memperoleh hasil hanya tanaman semusim saja (jagung-red). Sebelumnya masyarakat sudah mendengar kasak-kusuk rencana penanaman Tebu oleh Perhutani. Saya berpikir, bagaimana nanti nasib pesanggem ini kalau lahan yang menjadi gantungan hidup pesanggem ini di tanami tebu terus masyarakat akan makan apa? Maka sayapun berpikiran bahwa program IPHPS ini bisa menjaga keberlanjutan pangan dan pendapatan pesanggem.

**Q:** *Selama ini sebelum bapak mengajukan IPHPS ini bagaimana sistem kemitraan yang dibangun antara Perhutani dengan masyarakat penggarap di Tenggarejo ini?*

**A:** Sebelumnya kelompok pesanggem itu kan LMDH, ya itu tadi mas selama ini yang diterapkan Perhutani pesanggem hanya mendapatkan hasil dari tanaman semusim jagung itu saja mas. Selain itu Perhutani juga minta “pegubuk” tiap tahun kepada penggarap dimana tiap tahunnya pada musim tanam yaitu pesanggem ditarik Rp.15.000/1kg benih jagung. Alhamdulillah sejak pengajuan IPHPS ini Perhutani tidak lagi menarik ke pesanggem.

**Q:** *Bisa diceritakan bagaimana perjalanan pengurusan IPHPS KTH Wonodadi Lestari ini?*

**A:** Para warga menyerahkan foto KTH dan KK yang dikordinir melalui kelompok KTH Wonodadi Lestari. Pada waktu itu sebenarnya Perhutani sudah mulai mendengar tentang rencana warga untuk pengajuan IPHPS Tenggarejo, karena pada waktu yang hampir bersamaan Perhutani lewat Mandor juga menarik fotokopi KTP dan KK di dusun Mbakalan. Terus sama Pak RT ditolak karena KTP dan KK sudah diserahkan ke saya untuk pengajuan IPHPS. Mandor akhirnya kesini, minta foto kopian KTP dan KK alasannya disuruh sama atasan (Mantri) dengan alasan untuk data. Nah akhirnya pada tanggal 15 Mei 2018 KTH mengajukan IPHPS seluas 705.53 Ha, dengan jumlah anggota 712 keluarga.

**Q:** *Selanjutnya di dalam pengajuan tersebut, mulai proses pengajuan IPHPS sampai saat ini perkembangannya seperti apa pak?*

**A:** Pada tanggal 31 Januari 2019 diadakan verifikasi teknis subyek dan tutupan lahan oleh Kementerian LHK. Hasilnya menyatakan bahwa terdapat 440 ha dari 568 ha yang kami usulkan IPHPS, merupakan area kerjasama penanaman tebu antara perhutani dan PTPN X. Untuk penerbitan SK IPHPS, kementerian LHK akan melakukan pembahasan lanjutan.

**Q:** *Berarti saat ini masih proses mendapatkan SK IPHPS karena dalam vertek lahan yang di usulkan KTH Wonodadi Lestari ternyata ada lahan usulan yang masuk dalam kerjasama Perhutani dengan PTPN X begitu?*

**A:** Iya mas. Ya karena ada tumpang tindih tanaman tebu yang diajukan oleh pihak Perhutani yang dikerjasamakan dengan PTPN X dipangkuan hutan desa kami.

**Q:** *Perubahan apa yang kelompok KTH Wonodadi Lestari harapkan kalau nanti mendapatkan SK IPHPS?*

**A:** Harapannya tentunya dengan SK IPHPS dapat mensejahterakan anggota KTH kami, selain itu juga agar dapat memulihkan hutan kami hijau kembali.

**Q: Apa harapan kelompok bapak kepada Menteri/KLHK?**

**A:** Harapkan kami pertama adalah dapat terwujudnya SK IPHPS, kedua supaya KLHK merevisi alokasi lahan budidaya tebu di hutan pangkuan desa Tengharejo serta mendukung kami dalam menjalankan program IPHPS seperti yang diprogramkan oleh bapak presiden Joko Widodo.

**Q: Bagaimana peran pendamping menurut bapak sebagai ketua kelompok KTH Wonodadi Lestari ini?**

**A:** Cukup membantu, karena tanpa pendampingan dari PPLH Mangkubumi kami tidak bisa mengajukan IPHPS. Selain itu juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPLH Mangkubumi terhadap kelompok kami menambah wawasan dan pengetahuan kelompok. Ya saya berterima kasih kepada PPLH Mangkubumi”

**Q: Sebagai penutup, apa yang ingin bapak sampaikan?**

**A:** Kami mohon kepada bapak pendamping dari PPLH mangkubumi jangan bosan-bosan untuk mendampingi kami sampai menerima SK IPHPS dan tetap semangat. Untuk ibu Menteri LHK kami mohon segera merevisi penolakan tanaman tebu yang akan dilakukan perhutani dengan PTPN X.

## galeri MANGKUBUMI

Galeri kegiatan PPLH Mangkubumi dengan dukungan DGMI bulan September – Desember 2019



Talkshow IPHPS di Radio Perkasa



Pelatihan Pemetaan Lahan



Live In di Pantai Sanggar



Audiensi Ketua KTH Wonodadi Lestari Tengharejo dengan KHP Blitar didampingi PPLH Mangkubumi



Pelatihan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial - IPHPS dan Teknis Agroforestry



Pemetaan Partisipatif Lahan IPHPS



Rapat Koordinasi Desa Tengharejo



Penyusunan Aturan Internal & Rencana Kelola

News Letter ini dibangun atas inisiatif  
**Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi**  
 dengan dukungan dari DGMI - Samdhana Institute  
**ALAMAT**  
 Perumahan Permata Kota Blok D-11 Tulungagung  
 Telp. : 082213045602  
 Email : pplhmangkubumijatim@gmail.com  
**www.pplh-mangkubumi.or.id**



**DGM**  
INDONESIA

